

DINAMIKA PSIKOLOGIS PEMANFAATAN DATA TERPADU DALAM PENANGANAN KEMISKINAN DI DELI SERDANG

PSYCHOLOGICAL DYNAMICS USING INTEGRATED DATA ON POVERTY ALEVIATION IN DELI SERDANG

Togiaratua Nainggolan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial – Kementerian Sosial RI
Jln. Dewi Sartika No 200 Cawang III, Jakarta Timur
Email: togiaratua@gmail.com

diterima: 30 Januari 2019, Direvisi: 28 Agustus 2019; Disetujui: 29 Nopember 2019

Abstrak

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika psikologis pemanfaatan data terpadu untuk penanganan kemiskinan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang?. Sejalan dengan rumusan masalah ini, tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dinamika psikologis pemanfaatan data terpadu untuk penanganan kemiskinan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang- Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu, penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam dan Focuss Group Discussion (FGD) terhadap informan dari pengelola data terpadu dan Organisasi Perangkat Daerah pengelola program penanganan kemiskinan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan dinamika psikologis pemanfaatan data terpadu diawali dengan respon atas penugasan pengelolaan data terpadu dari pemerintah pusat dalam bentuk respon kognitif, respon afektif, dan respon konatif. Tiga respon ini berlangsung saling mempengaruhi, namun secara kognitif belum sejalan untuk saling menguatkan untuk membangun persepsi atau citra positif. Secara afektif validitasnya dinilai belum meyakinkan, hingga secara konatif hal itu membatasi pemanfaatan data terpadu. Muncul efek domino berupa keragu-raguan pengelola dalam mempromosikan data terpadu kepada pihak terkait. Bahkan di internal Dinas Sosial Deli Serdang pun belum sepenuhnya menggunakan data ini. Untuk meningkatkan pemanfaatan data terpadu, selain perbaikan manajemen umum, pihak pengelola di tingkat pemerintah pusat dan daerah hendaknya mempertimbangkan dinamika psikologis yang berkembang sehingga tercipta harmonisasi. Harmonisasi ini diharapkan menghilangkan situasi disonansi kognitif sekaligus mempercepat pemanfaatan data terpadu hingga peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat miskin.

Kata Kunci: *dinamika psikologis; pemanfaatan; data terpadu.*

Abstract

The problem discussed in this study is how the psychological dynamics of the use of integrated data for handling poverty in the Deli Serdang District Government? In line with the formulation of this problem, the purpose of this research is to describe the psychological dynamics of the use of integrated data for handling poverty in the Deli Serdang District Government in North Sumatra Province. For this reason, research is conducted using a qualitative approach. Data collection uses observation techniques, in-depth interviews and Focus Group Discussion (FGD) of informants from integrated data managers and Regional Organization Organizers managing poverty programs in the Deli Serdang District Government, to be further analyzed descriptively qualitatively according to the research objectives. The results showed the psychological dynamics of integrated data utilization begins with the response to the assignment of integrated data management from the central government in the form of cognitive responses, affective responses, and conative responses. These three responses take place mutually influencing, but cognitively not yet in line to strengthen each other to build positive perception or image. Effectively the validity is considered not convincing, so it conatively limits the use of integrated data. The domino effect appears in

the form of manager's hesitation in promoting integrated data to related parties. Even internal Deli Serdang Social Service has not fully used this data. To improve the use of integrated data, in addition to improving general management, managers at the central and regional government levels should consider the evolving psychological dynamics so as to create harmonization. This harmonization is expected to eliminate the situation of cognitive dissonance while simultaneously accelerating the use of integrated data to improve the social welfare of the poor.

Keywords: *psychological dynamics; utilization; integrated data.*

PENDAHULUAN

Secara sederhana, data adalah fakta yang diambil untuk kepentingan tertentu. Ketika fakta tentang identitas keluarga miskin diambil dengan cara mencatat dan atau bahkan mendokumentasikan, seketika fakta tersebut sudah berubah menjadi data keluarga miskin.

Bagi Indonesia, data ini populer dengan nama Basis Data Terpadu (BDT), yaitu kumpulan dari data keluarga miskin untuk seluruh Indonesia. Isinya memuat nama dan alamat (*by name by adress*), informasi sosial, ekonomi dan demografi sekitar 40 persen penduduk Indonesia yang peringkat kesejahteraannya terendah (TNP2K, 2018). Data ini dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui kegiatan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) pada tahun 2011, sehingga bagi sebagian orang data ini juga dikenal dengan nama Data PPLS (Sitepu dkk, 2018)

Awalnya data ini dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Selanjutnya berdasarkan amanat Undang-Undang (UU) RI Nomor 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pengelolaan data ini beralih ke Kementerian Sosial RI sejak tahun 2016, dengan nama baru Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT PPFM). Peralihan pengelola dan perubahan nama ini tidak mengubah substansi data, termasuk makna kemiskinan dan fakir miskin, karena fakir miskin itu sendiri merupakan bagian dari kemiskinan.

Saat ini data terpadu tersebut merupakan hasil Pemutahiran BDT yang dilakukan oleh BPS tahun 2015, yang dilanjutkan dengan pemutahiran oleh Kementerian Sosial secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Perubahan terakhir ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI (Kepmensos) Nomor 57/HUK/2017 pada bulan Desember 2017.

Secara kelembagaan, pengelolaan data ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI (Kepmensos) Nomor 30/HUK/2017, dengan membentuk tim pengelola lintas kementerian/ lembaga yang disebut Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Pokja Data Terpadu). Pokja ini terdiri dari 6 unsur kementerian/ lembaga, yaitu: (1) Kementerian Sosial, (2) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), (3) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), (4) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), (5) Badan Pusat Statistik (BPS), dan (6) Tim Nasional Percepatan Penanganan Kemiskinan (TNP2K).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa selain aspek nama dan substansi data, kesinambungan juga terjadi antara pengelola lama dengan yang baru karena TNP2K selaku pengelola lama tetap masuk dalam Pokja Data Terpadu. Oleh sebab itu, untuk keseragaman dan membantu pemahaman pembaca, istilah yang dipakai dalam tulisan ini adalah “data terpadu” yang merujuk pada data keluarga miskin atau fakir miskin sebagaimana dimaksudkan dalam UU Nomor 13/2011.

Perbaikan data ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas penanganan kemiskinan di Indonesia. Namun Sitepu, dkk (2018) menemukan bahwa pemanfaatan data terpadu ini masih sangat rendah, termasuk di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. Penyebab utamanya adalah: (1) rendahnya pengetahuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas amanat UU Nomor 13/2011 yang mewajibkan semua pihak yang melakukan penanganan fakir miskin menggunakan data yang sama, (2) kelembagaan dan pengelolaan data terpadu yang belum profesional (3) persepsi terhadap data terpadu yang belum sepenuhnya positif.

Pemanfaatan merupakan sebuah perilaku yang dilatarbelakangi berbagai pertimbangan hingga muncul suatu keputusan untuk memanfaatkan. Pertimbangan tersebut terjadi dalam bentuk sebuah dinamika dalam diri seseorang yang dikenal dengan nama dinamika psikologis. Hasil penelitian Sitepu, dkk (2018) juga menunjukkan bahwa orang yang mengenal data terpadu, belum tentu memahaminya. Sementara orang yang memahaminya pun belum tentu memanfaatkannya. Kasus yang sama terjadi Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

METODE

Sejalan dengan penjelasan ini, masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika psikologis pemanfaatan data terpadu untuk penanganan kemiskinan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang?. Sejalan dengan permasalahan ini, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dinamika psikologis pemanfaatan data terpadu untuk penanganan kemiskinan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Untuk menjawab permasalahan, penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam dan *Focuss Group Discussion* (FGD) terhadap informan yang berasal dari pengelola program penanganan kemiskinan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif sesuai dengan tujuan penelitian.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2018) dinamika diartikan sebagai gerak (dari dalam); tenaga yang menggerakkan; semangat. Jika dikaitkan dengan kata sosial, akan menjadi gerak masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian, dinamika atau dinamis merupakan lawan kata dari statis. Dinamis berarti selalu bergerak, berubah mengikuti keadaan karena pengaruh tertentu, baik internal maupun eksternal. Statis berarti diam atau cenderung konstan. Sedangkan kata psikologis berkenaan dengan psikologi; bersifat kejiwaan atau perilaku.

Jika dua kata tersebut digabung menjadi dinamika psikologis, dapat dimaknai menjadi perubahan yang terjadi dalam perilaku terkait dengan objek tertentu. Objek tertentu yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pemanfaatan data terpadu dalam penanganan kemiskinan.

Pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang berarti guna atau faedah. Bermanfaat berarti ada manfaatnya, berguna atau berfaedah. Dengan demikian pemanfaatan berarti proses atau cara, perbuatan memanfaatkan untuk hal tertentu (KBBI, 2018). Berdasarkan penjelasan di atas, dinamika psikologis pemanfaatan data terpadu kemiskinan dapat dimaknai sebagai perubahan atau pasang surut perilaku pemanfaatan data terpadu kemiskinan. Perubahan atau pasang surut perilaku ini terkait dengan sikap dan

atau perilaku untuk memanfaatkan atau tidak memanfaatkan data dimaksud dalam penetapan sasaran program penanganan kemiskinan dengan segala pertimbangan dan faktor yang mempengaruhinya.

Walgito (2003) menjelaskan tiga komponen yang membentuk dan mempengaruhi perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan dinamika psikologis, yaitu (1) komponen kognitif (*perseptual*), (2) komponen afektif (*emosional*), dan (3) komponen konatif (*action component*). Komponen kognitif (*komponen perseptual*) merupakan komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, dan keyakinan seseorang terhadap objek tertentu. Komponen afektif merupakan komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek tertentu. Sedangkan komponen konatif adalah komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek tertentu.

Ketiga komponen ini dapat berfungsi secara harmonis. Namun tidak jarang disertai konflik sehingga tidak sejalan atau tidak saling menguatkan, seperti konflik antara pikiran (*aspek kognitif*), perasaan (*aspek afeksi*), dan kemauan (*aspek konatif*). Namun ketiganya senantiasa berkontribusi dalam setiap perilaku, terlepas dari besar atau kecilnya kontribusi dimaksud.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika pemanfaatan terjadi dalam berbagai tahapan dalam proses pemanfaatan data terpadu. Untuk itu, gambaran dinamika psikologis yang terjadi dijelaskan mengikuti tahapan dimaksud. Untuk efektivitas penulisan, temuan penelitian dengan sengaja diintegrasikan dalam pembahasan.

1. Gambaran Informan dan Pengenalan Data Terpadu

Informan terpilih merupakan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai program penanganan kemiskinan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. OPD terpilih ada yang sudah mengenal data terpadu dan ada pula yang belum mengenalnya. Gambaran tentang hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Informan Berdasarkan Pengenalan Terhadap Data Terpadu

No.	Informan/Organisasi Perangkat Daerah	Kenal	Tdk Kenal
1.	Dinas Sosial	x	
2.	Dinas Pendidikan	x	
3.	Dinas Kesehatan	x	
4.	Dinas Tenaga Kerja		x
5.	Dinas Perikanan dan Kelautan		x
6.	Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		x
7.	Dinas Pertanian		x
8.	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman		x
9.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		x
10.	Bappeda	x	

Tabel di atas menggambarkan betapa rendahnya pengenalan OPD atas data terpadu. Dari 10 OPD, hanya 4 (empat) yang mengenal data terpadu, yaitu Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Bappeda. Sisanya 6 (enam) OPD belum mengenal. Selain OPD di atas, peneliti mewawancarai 2 orang anggota DPRD, Ketua dan Wakil Ketua komisi terkait. Ternyata mereka baru mendengar keberadaan UU RI Nomor 13/2011 dan data terpadu bersamaan dengan kehadiran peneliti.

2. Pengelolaan Data Terpadu

Sebagaimana dijelaskan oleh Sitepu dan Nainggolan (2019) pengelolaan terkait dengan 4 hal, yaitu: (a) penandatanganan nota kesepahaman, (b) regulasi pengelolaan, (c) sumber daya pengelolaan, dan (d) pelaksanaan verifikasi dan validasi. Untuk Kabupaten Deli Serdang, pengelolaan data terpadu dilakukan oleh Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di Dinas Sosial. Sebagai mitra Kementerian Sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial di daerah, Dinas Sosial menerima pekerjaan ini dengan mengatakan:

“Yah...kami menerima pekerjaan ini sebagai bagian dari tanggung jawab kami, sekaligus sebagai perpanjangan tangan Kementerian Sosial di wilayah ini. Untuk itu kami bekerja mengikuti mekanisme yang ditetapkan Kementerian Sosial sebagai pengelola di tingkat nasional. Tentu saja dengan segala plus minus-nyalah pak”.

Secara formal, proses penandatanganan nota kesepahaman dengan Kemensos mengawali komitmen Pemerintah Daerah untuk mengelola sekaligus memanfaatkan data terpadu. Berdasarkan catatan Kementerian Sosial, Deli Serdang merupakan salah satu diantara 514 kabupaten-kota yang berkomitmen memanfaatkan data ini (Ditjen PFM-Kementerian Sosial, 2018). Menanggapi hal itu, informan menjelaskan lebih lanjut:

“Alhamdulillah, Kabupaten Deli Serdang masuk bagian dari 514 kabupaten/kota yang menggunakan data terpadu. Jadi kami sudah terdaftar dalam data rekap pengguna di Kemensos Pak. Cuma ya itu, kami masih sekedar memanfaatkan sumber daya yang ada, belum pengadaan pak”.

Pengakuan di atas mencerminkan beban

yang ditanggung Dinas Sosial sebagai pengelola data terpadu. Terkait hal ini, informan menjelaskan:

“hingga saat ini kami hanya bisa memanfaatkan peralatan seadanya. Kami belum punya ruangan khusus, termasuk computer masih pake laptop pribadi pendamping. Ya... karena pengelolanya pun diambil dari pendamping. Tapi ya... biar begitu, kegiatan jalan terus”.

Ketika hal ini dikonfirmasi, tenaga pendamping yang bertugas sebagai pengelola teknis mengatakan:

“... sejauh ini keterbatasan sarana masih teratasi pak. tapi ya itulah kami harus bekerja ekstra, terutama keamanan datanya pak. Kami pake laptop pribadi, kalo laptop-nya hilang macam mana pak, repot kan?. Kalau mau bagus, ya computer khususlah. Tapi macam manalah pak, saya cuma pendamping, gak beranilah usul macam-macam. Kita ikuti ajalah apa kata pimpinan, katanya anggaran masih terbatas”.

Secara kognitif, pengelola sadar sepenuhnya akan berbagai keterbatasan dalam pekerjaan ini. Sementara secara afektif, penjelasan ini mengisyaratkan beratnya beban yang ditanggung pengelola. Mulai dari beban anggaran, beban psikologis, dan beban sosial. Beban anggaran muncul sebagai resiko dari kebutuhan teknis pengelolaan data mulai dari sarana dan prasarana pendukung dan honor pengelola. Terkait honor, “... katanya sih ada, tapi belum cair” kata pendamping yang bertugas sebagai pengelola. Sementara untuk penganggaran di daerah masih menemui kendala ketiadaan payung hukum. Lebih jauh tentang hal ini, informan Dinas Sosial menjelaskan:

“...pada level nasional ada UU Nomor

13 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa pendataan fakir miskin dilakukan oleh BPS. Sedangkan Kementerian Sosial bertugas menetapkan kriteria fakir miskin dan melakukan verifikasi dan validasi, menerbitkan kartu identitas fakir miskin dan mengelola data terpadu. Selanjutnya, sebagai pengelola di tingkat nasional Kementerian Sosial menerbitkan Permensos Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Sementara pada tingkat daerah, hingga penelitian ini dilakukan belum ditemukan peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan data terpadu”.

Kondisi ini menggambarkan penerimaan Dinas Sosial atas kehadiran data terpadu di daerah, baik sebagai pengelola maupun pengguna. Beban yang ditanggung ini sekaligus mempengaruhi aspek konatif pengelola, yaitu kinerja pemanfaatan data terpadu karena bekerja dengan fasilitas yang terbatas. Hal ini sejalan dengan penjelasan Susanti, dkk (2014) yang mengatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan atau pemanfaatan sebuah layanan adalah fasilitas yang disediakan pemerintah dan yang dimiliki pengguna.

Bebansosial psikologis ini semakin terasa sehubungan dengan kompleksitas permasalahan data terpadu, terutama dikaitkan dengan tugas melaksanakan verifikasi dan validasi (verivali). Situasi ini menyebabkan terjadinya keterlambatan proses verivali yang seharusnya selesai tahun 2017 pun masih berlangsung hingga penelitian ini dilakukan (April, 2018). Menjelaskan hal ini, informan Dinas sosial mengatakan:

“ ...ya... bagaimana lagi pak,

masyarakat sudah jenuh. Bahkan ada yang menolak didata. Katanya tidak ada manfaatnya, capek didata terus tapi bantuannya gak datang-datang. Di sisi lain, sebagian orang menolak dikeluarkan dari data terpadu. Takut kehilangan (peluang) bantuan sosial dari pemerintah. Bahkan dengan beraninya masyarakat mengatakan ‘...sibuk kali bapak mengeluarkan kami dari data. Ini kan uang negara, bukan uang bapak’, bapak urus saja yang lain’. Sampe begitu kata-katanya pak”.

Permasalahan lain dikemukakan oleh informan dari pengelola data terpadu dengan mengatakan:

“dalam beberapa kasus, aparat desa dan perangkatnya turut campur pak. Ya... maunya orang-orangnya aja yang masuk pak, dengan cara halus bahkan kadang terang-terangan. Ini mempengaruhi validitas data hingga terjadi inclusion dan exclusion error”.

3. Pemanfaatan Data Terpadu

Kata “pemanfaatan” mengandung pengertian sebagai suatu proses, mulai dari mengenal, memahami, memiliki hingga memakai. Proses ini meliputi aktivitas internal pengelola untuk mengenalkan dan pihak eksternal yang ingin mengenal hingga memakai data terpadu dalam penetapan sasaran program kemiskinan. Dinamika psikologis yang terjadi dapat kami gambarkan sebagai berikut.

a. Pengenalan

Hasil penelitian menunjukkan hanya 4 dari 10 informan mengenal data terpadu. Sedangkan sisanya (6 informan) belum mengenal. Satu dari empat informan OPD mengaku mengenal data terpadu karena tuntutan tugasnya, menjelaskan:

“... pengenalan data terpadu terjadi begitu saja pak. Kita mengikuti irama pekerjaan sesuai tupoksi. Pas masuk dinas sosial, kami belajarlal, lalu ketemu istilah BDT, TNP2K, PPLS dan lain-lain. Trus pengelolaan data terpadu pindah ke Kemensos, tapi TNP2K masih tetap ada dan masuk Pokja. Sebagai mitra kerja Kemensos di daerah, ya... kami terlibatlah. Itulah bentuk tanggung jawab dan konsekwensi jabatan kami. Jadi kami mengikuti kegiatan Kemensos sebagai pengelola data terpadu di tingkat pusat. Dinas Sosial pun menjadi pengelola di tingkat daerah, begitu pak. Trus sebagai pengelola di tingkat daerah kadang-kadang kami juga belajarlal ke Kemensos. Kadang-kadang kan kita dipanggil mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis dan sebagainya“, kata informan dari Dinas Sosial.

Ini berarti proses pengenalan terjadi secara vertikal dari atas ke bawah atau sebaliknya. Hal yang berbeda terjadi di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Proses pengenalan terjadi secara horizontal melalui interaksi sesama OPD di daerah. Lebih jauh informan Dinas Pendidikan menjelaskan:

“ kami kenal data terpadu pas diundang rapat di Dinas Sosial kaitannya dengan beasiswa miskin atau Kartu Indonesia Pintar. Dulu kami sempat terjun langsung ke lapangan mencari keluarga miskin bekerjasama dengan pendamping PKH, karena kami tahu penerima PKH adalah keluarga miskin. Sekarang karena sudah konek dengan Dinas Sosial, kami lebih enak, dan ternyata.... PKH tidak identik dengan data terpadu. Ya... terasa lebih tertata sekarang programnya. Saya rasa Dinas Sosial pun merasa terbantu melaksanakan komplementaritas program“.

Pengakuan senada dikemukakan oleh Dinas Kesehatan dengan mengatakan:

“pernah kami dengar BDT atau baca lewat media, tapi secara konsep tahu pas kami diundang rapat ke Dinas Sosial. Saat itu kami juga membahas keluarga miskin yang butuh bantuan perawatan di rumah sakit“.

Sedangkan untuk Bappeda, mereka mengaku sudah mengenalnya sejak awal ketika data terpadu masih dikelola oleh TNP2K dengan nama Basis Data Terpadu (BDT).

Bagi OPD yang belum mengenal, mereka mengaku ada kalanya programnya terkait dengan kemiskinan, namun sasarannya lebih ditentukan sendiri bekerja sama dengan *stakeholder* yang tersedia di lapangan seperti pendamping PKH, Ketua RT dan Ketua RW, aparat desa, atau tokoh masyarakat lain yang dianggap relevan. Menanggapi ketidaktahuan mereka atas data terpadu, mereka mengatakan:

“ya.. mungkin aja kami pernah mendengar data terpadu pak. Kalau bukan saya, bisa aja teman-teman atau pejabat sebelumnya, tapi mungkin kami belum menyadari hal itu sebagai satu kebutuhan dalam penetapan sasaran program. Akibatnya berlalu begitu saja pak. Kami belum pernah menerima sosialisasi dari instansi pusat atau diajak Dinas Sosial membahas hal itu pak“, demikian pengakuan mereka dalam sesi diskusi kelompok“.

Ketika peneliti menanyakan kewajiban menggunakan data terpadu, mereka mengaku tidak mengetahui hal itu, termasuk keberadaan UU Nomor 13 tahun 2011 yang mengamatkan hal itu. Lebih jauh mereka bahkan mengungkapkan:

“... terus terang kami menyesal baru mengetahui hal ini. Jika demikian mari

kita proses untuk yang akan datang, tapi ya itu, Dinas Sosial pun sebagai pengelola harus melakukan sosialisasi, termasuk keberadaan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Biar kami-kami ini tahu mekanismenya, akses datanya kayak apa. Jika mungkin data itu dibuka saja sehingga kita bisa langsung akses. Ini kan jamannya online ya kan?”

Menanggapi keluhan ini, pihak Dinas Sosial lapang dada mengakui ketiadaan sosialisasi data terpadu seraya menjelaskan berbagai keterbatasan sekaligus menyampaikan rasa terimakasih atas respon perwakilan OPD yang menjadi peserta diskusi kelompok.

“Kami senang atas respon bapak-ibu semua. Momen ini akan kami manfaatkan mengoptimalkan pemanfaatan data terpadu ini. Karena pemanfaatan data ini akan mempercepat penanggulangan kemiskinan. Ya kan bapak-ibu, nantinya kita jadi gotong royong mengentaskan kemiskinan di Deli Serdang ini. Ini akan kami laporkan ke pimpinan agar kegiatan sosialisasinya mendapat dukungan, terutama anggaran”.

Dari penjelasan di atas muncul beberapa persoalan dalam pengenalan data terpadu. Pertama, sosialisasi berjalan sangat lambat, baik oleh Kementerian Sosial sebagai pengelola baru maupun oleh TNP2K sebagai pengelola lama. Hal yang sama dialami oleh Dinas Sosial. Kelambatan ini menyebabkan pengetahuan atas data terpadu minim. Pada hal Jayanti, dkk (2011) mengatakan bahwa pengetahuan merupakan bagian yang penting dari perilaku konsumen, karena pengetahuan mempengaruhi seseorang sebelum memakai suatu produk atau jasa. Artinya pengetahuan atas data terpadu akan mempengaruhi persepsi terhadap data terpadu itu sendiri. Sementara Kotler & Amstrong (2008) menjelaskan bahwa

persepsi merupakan proses dimana seseorang menginterpretasikan sebuah informasi produk, merupakan salah satu faktor psikologis yang memengaruhi perilaku konsumen.

Jika data terpadu diposisikan sebagai satu produk jasa, maka kualitas informasi berupa pengetahuan atas produk dimaksud akan mempengaruhi perilaku OPD sebagai konsumen.

Kedua, model sosialisasi vertikal hanya mengandalkan Kementerian Sosial sebagai instansi pemerintah pusat. Seyogyanya instansi lain di tingkat pusat dilibatkan, Misalnya Kementerian Pertanian melakukan sosialisasi data terpadu ke Dinas Pertanian, Kementerian Kesehatan ke Dinas Kesehatan, Kementerian Pendidikan ke Dinas Pendidikan dan seterusnya. Bahkan jika mungkin melibatkan semua Kementerian/ Lembaga yang menjadi anggota Pokja Data Terpadu. Misalnya Kementerian Dalam Negeri mengaktifkan koordinasi langsung ke Gubernur, Bupati, Walikota, dan DPRD. Demikian pula instansi lainnya.

b. Pemahaman

Hasil penelitian menunjukkan hanya tiga OPD yang memahami dengan baik data terpadu, yaitu Dinas Sosial, Bappeda, dan Dinas Pendidikan. Pemahaman Dinas Sosial atas data terpadu adalah hal yang wajar mengingat statusnya sebagai pengelola data dimaksud di daerah. Hal yang sama terjadi pada Bappeda sehubungan dengan status instansi sejenis di tingkat pusat (Bappenas) sebagai anggota Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin/Pokja Data Terpadu (sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) Nomor 30/HUK/2017). Pemahaman Bappeda ini juga didukung oleh TNP2K yang menjadikan Bappeda sebagai mitra kerjanya di daerah. Sedangkan

informan dari Dinas Pendidikan mengaku memahami data terpadu karena terbantu salah satu stafnya pindahan dari Dinas Sosial.

“Namun demikian, pemahaman kami tetap saja kurang memadai karena kami sulit mengikuti dinamika yang terjadi di internal pengelolaan data terpadu pak”.

Demikian pengakuan informan Dinas Pendidikan.

Selain tiga OPD tersebut, beberapa OPD lain salah dalam memahami data terpadu. Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja mengira data peserta PKH sebagai data terpadu. OPD ini dengan sengaja mencari peserta PKH bekerjasama dengan pendamping untuk dijadikan sasaran programnya.

“Ya..yang kami tahu seperti itu pak, jadi kalau butuh peserta pelatihan tenaga kerja, kami hubungi aja pendamping PKH di lapangan. Soalnya kami dapat arahan dari pimpinan untuk memprioritaskan peserta PKH dalam kaitannya kerjasama rame-rame mengeroyok kemiskinan keluarga PKH” demikian pengakuan informan Dinas Tenaga Kerja.

Penjelasan ini mengisyaratkan bahwa mereka merasa sudah memanfaatkan data terpadu. Pemanfaatan tersebut dilakukan dalam konteks komplementaritas PKH, dan belum didasarkan pada pelaksanaan UU Nomor 13 tahun 2011. OPD lainnya dengan jujur mengakui “macam mana mau paham pak, nama data terpadu *aja* baru pertama kali ini dengar dari bapak” (maksudnya dari peneliti). Pengakuan ini dibenarkan OPD lain saat diskusi kelompok dengan mengatakan:

“...biar baru dengar saat ini, sesungguhnya kami senang dengan data ini. Tapi muatan data ini ditambah lagilah sesuai dengan kebutuhan sektoral

masing-masing dinas. Misalnya selain nama keluarga miskin, kami dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman perlu data status kepemilikan tanah. Jadi kalau kami membantu rumah mereka yang tidak layak huni, tidak perlu lagi mendata ke lapangan. Begitu juga dengan kebutuhan dinas lainnya. Kalau bisa dipenuhi, saya kira tidak perlu setiap OPD mendata, ini aja kita pakai. Jadi benar kata bapak tadi, pengentasan kemiskinan pun akan semakin cepat, tapi sosialisasi harus intensif, bukan hanya data terpadu, termasuk undang-undangnya. Sasarannya pun harus sampe ke DPRD agar Perda-nya diterbitkan sebagai payung hukum”.

Demikian peserta diskusi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang direspon positif oleh seluruh peserta.

Secara afektif muncul rasa haru dan gembira menyambut kehadiran data terpadu, namun tidak didukung aspek kognitif yang memadai. Pentingnya pemahaman OPD atas data terpadu ini sejalan dengan pendapat Mowen (1998) yang mengatakan bahwa tahap pemaparan, perhatian, dan pemahaman merupakan bagian penting dari proses persepsi. Sementara Radiansyah (2016) menyatakan bahwa persepsi merupakan hasil akhir dari informasi yang ditangkap individu atas dasar sensasi dan memori yang berasal dari lingkungan. Dalam hal ini sensasi dan memori yang dimaksud didasarkan atas informasi yang diperoleh OPD berdasarkan sosialisasi hingga membentuk persepsi positif atas manfaat data terpadu.

c. Pemilikan

Arimbawa, dkk (2017) menemukan bahwa sikap pengguna memiliki pengaruh terhadap niat pengguna yang kemudian dapat menjadi variabel mediasi hubungan antara persepsi pengguna dan niat untuk

menggunakan sesuatu. Sejalan dengan pendapat ini, niat menggunakan data terpadu, dilaksanakan dengan mengenal, memahami, hingga membutuhkan dan memiliki data terpadu. Untuk memiliki data terpadu, harus mengajukan permohonan ke pengelola, yaitu Kementerian Sosial atau Dinas Sosial di daerah.

Sejalan dengan penjelasan di atas, OPD yang memiliki data terpadu hanya dua, yaitu Dinas Sosial dan Bappeda. Kedua OPD ini memilikinya dalam kapasitas sebagai pengelola tingkat daerah sekaligus sebagai pengguna. Secara umum terbatasnya kepemilikan data terpadu ini disebabkan oleh lemahnya sosialisasi atas keberadaan data terpadu dan UU Nomor 13/2011.

“Ya... otomatis kami tidak tahu. Kalau tidak tahu ya tidak kenal. Kalau tidak kenal, bagaimana mau memilikinya?, ini sumber persoalannya pak”.

Demikian salah satu peserta diskusi.

Dinas Pendidikan yang sudah mengenal dan memahami data terpadu belum memilikinya karena mereka mengira data tersebut hanya data sektoral yang kepemilikannya hanya sebatas instansi sosial seperti Kementerian Sosial dan Dinas Sosial di daerah.

“Karena penilaian kami demikian, kami merasa tidak perlu memilikinya. Kalau kami butuh, tinggal koordinasi aja dengan Dinas Sosial. Kami tidak tahu data tersebut bisa dimiliki OPD lain”.

Ini berarti terjadi salah persepsi antara pengelola dengan calon pengguna sehingga tidak muncul niat memiliki hingga menggunakan data terpadu. Persoalannya kembali lagi ke sosialisasi yang minim dari pengelola.

- d. Pemakaian data dalam penetapan sasaran program.

Secara eksplisit, OPD yang memakai data terpadu untuk penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan hanya Dinas Sosial. Sedangkan secara implisit, Bappeda memanfaatkannya untuk penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Deli Serdang. Dengan demikian, ada dua OPD yang memanfaatkan data terpadu ini.

Rendahnya pemanfaatan ini merupakan hal yang wajar mengingat kondisi pengenalan, pemahaman dan pemilikan data terpadu yang masih minim seperti diuraikan di atas. Situasi ini menunjukkan rendahnya kinerja sosialisasi atas keberadaan data terpadu, baik oleh TNP2K dan Bappeda selaku pengelola awal maupun oleh Kementerian Sosial dan Dinas Sosial selaku pengelola saat ini.

“Persoalannya adalah siapa yang menjadi penanggung jawab kegiatan sosialisasi ini di daerah” demikian pertanyaan salah satu peserta diskusi kelompok. Menanggapi hal ini, forum FGD tidak membuat satu jawaban yang tegas, kecuali menunjuk Kementerian Sosial bersama anggota Satgas Terpadu.

“Ini berarti masih ada persoalan krusial yang harus segera diselesaikan pengelola di tingkat pusat, tugas dan tanggung jawab daerah harus jelas”.

Demikian tanggapan peserta diskusi dari Dinas Tenaga Kerja.

Ketidakjelasan ini menyebabkan Dinas Sosial sebagai pengelola tingkat daerah ragu untuk melangkah lebih jauh. Persoalan mendasar lainnya adalah persepsi OPD terhadap data terpadu belum sepenuhnya positif. Bahkan di internal Dinas Sosial masih mengeluhkan validitas data tersebut. Salah satu peserta diskusi dari Dinas Sosial mengungkapkan:

“sebaiknya pengelolaan data terpadu ini diserahkan saja ke pihak lain yang

lebih professional biar tuntas. Soalnya dari dulu data ini bermasalah terus”.

Mendengar pernyataan ini, peserta FGD yang lain kaget dan terdiam melongo saling lirik penuh ekspresi tanda tanya, terkesan menggugat kelayakan data terpadu ini untuk dipakai. “Lho, kalau di internal pengelola aja masih diragukan macam mana mau dipromosikan?”, demikian ungkapan peserta FGD dari OPD yang lain.

Setelah ditelusuri lebih jauh, sumber masalah pengelolaan bukan saja bersumber dari pendelegasian penugasan ke daerah yang dirasakan kurang tuntas oleh daerah, tetapi juga kejelasan status pengelolaan di daerah pasca peralihan pengelolaan dari TNP2K ke Kementerian Sosial.

“Kami juga masih bingung ini pak, kami diserahi pusat mengelola data terpadu ini. Tapi kami lihat, TNP2K juga masih seperti pengelola. Mereka masih menjalankan kegiatan ke daerah, tapi mereka kerjasama dengan Bappeda, bukan Dinas Sosial. Macam mana ini pak? Kalau kata teman-teman bilang ini seperti dualisme dalam pengelolaan. Tapi ini kata teman-teman ya pak”.

Demikian ungkapan informan dalam wawancara.

Persoalan ini menimbulkan suasana kurang kondusif secara psikologis di lingkungan pengelola.

”... kami kira ini masalahnya ada di tingkat pusat, yang dampaknya ke daerah. Kami dengar teman-teman di daerah lain juga begini pak”.

Demikian informan melanjutkan komentarnya.

Suasana internal pengelola sebagaimana dijelaskan di atas, menyebabkan mereka tidak fokus “menjual” data terpadu ke unit lain.

“Macam inilah pak situasinya, macam mana lagi. Otoritas kita sebagai pengelola jadi begini. Belum lagi validitas data yang masih banyak diprotes warga. Kita kan jadi sedikit ragu menjual data ini pak. tapi macam manalah kita tetap kerjakan”.

Keseluruhan dinamika ini terakumulasi dan berpengaruh pada proses hingga kinerja pengelola data terpadu di daerah, hingga menyebabkan rendahnya pemanfaatan data terpadu.

Penjelasan di atas, menggambarkan bahwa pengelola data terpadu mengalami *disonansi kognitif* sebagaimana dijelaskan oleh Baron & Byrne (2004). Keadaan yang tidak menyenangkan karena menyadari ketidaksinkronan antara komponen pengetahuan yang satu dengan yang lainnya, yang kemudian mempengaruhi sikap dan perilaku pemanfaatan data terpadu.

Situasi ini membawa efek domino berupa ketidakpercayaan diri pengelola dalam mempromosikan data terpadu kepada pihak terkait. Bahkan di internal Dinas Sosial Deli Serdang pun belum sepenuhnya menggunakan data ini sebagaimana dijelaskan oleh Sitepu dan Nainggolan (2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dinamika psikologis pemanfaatan data terpadu di Pemerintah Daerah Deli Serdang diawali dengan respon atas penugasan oleh pemerintah pusat. Respon dimaksud berlangsung dalam bentuk respon kognitif, respon afektif, dan respon konatif. Tiga respon ini berlangsung saling mempengaruhi, namun belum sejalan (belum harmonis) untuk saling menguatkan membangun persepsi atau citra positif atas data terpadu. Kondisi aspek kognitif ini, menimbulkan *disonansi*

kognitif, yaitu suasana hati kurang nyaman bagi pengelola karena beban anggaran dan beban sosial psikologis. Akhirnya secara konatif hal ini membatasi langkah pengelola memperomosisikan data terpadu. Sementara pengguna dan atau calon pengguna, menyambut baik kehadiran data terpadu secara afektif dengan disertai rasa haru dan gembira, namun secara konatif belum bisa memanfaatkannya karena aspek kognitif yang terbatas.

SARAN

Sejalan dengan penjelasan di atas, untuk meningkatkan pemanfaatan data terpadu, selain manajemen umum, pihak pengelola di tingkat pemerintah pusat dan daerah hendaknya mempertimbangkan dinamika psikologis yang berkembang dalam pengelolaan data terpadu sehingga tercipta harmonisasi antara aspek kognitif, afektif dan konatif atas data terpadu. Harmonisasi ketiga aspek ini diharapkan menghilangkan situasi *disonansi kognitif* sekaligus mempercepat pemanfaatan data terpadu hingga peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat miskin.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami sampaikan kepada jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang- Provinsi Sumatera Utara atas kerjasamanya dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, D. (2005). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia: Dilengkapi dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan*. Surabaya: Amelia.
- Arimbawa, P.A. P., Surachman dan Hussein, A. S. (2017). Pengaruh Persepsi dan Sikap Pemain Terhadap Niat Menggunakan *Mobile Game* menggunakan *Technology Acceptance Model*, Jurnal Ilmiah Manajemen, Volume VII, No. 3, Okt 2017, 348 –362.
- Baron, Robert.A. & Byrne, Donn. (2004). *Psikologi Sosial*. (Edisi 10) Alih Bahasa: Ratna Djuwita. Jakarta: Erlangga.
- Ditjen PFM-Kementerian Sosial. (2018). *Rekapitulasi MoU Data Terpadu PPFM*. Jakarta: Ditjen PFM-Kementerian Sosial RI.
- Jayanti TS, Djamaludin MD, Latifah M. (2011). Persepsi, Pengetahuan, Dan Perilaku Remaja Dalam Pembelian *Compact Disk* Bajakan. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*. 4(2): 190-198.
- Kotler P & Amstrong G. (2008). *Prinsip-Prinsip Pemasaran* Jilid 1. Ed ke-12. Sabran B, penerjemah. Jakarta (ID): Erlangga. Terjemahan dari *Principles of Marketing Twelfth Edition*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), (diakses 4 Desember 2018)
- Mowen, J.C. dan Minor, M. (1998). *Consumer Behavior*. Ed ke-5. New Jersey: Prentice Hall.
- Pengertian Dinamika Menurut Para Ahli, <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-dinamika-menurut-para-ahli/> (diakses tgl 4 Desember 2018)
- Radiansyah, M. (2016). *Analisis Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai di Kota Medan*(tesis). Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Sitepu, A, dkk. (2018). *Pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir*

- Miskin (Executive Summary)*. Jakarta: Puslitbang Kessos-Kementerian Sosial RI.
- Sitepu, A & Nainggolan, T. (2019). Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Sosio Konsepsia* Vol 8 No 2 Januari- April 2019, hal 66-80.
- Susanti, A., Saedudin, Rd. R., Witarsyah, D. (2014). *Government Kabupaten Klaten Menggunakan Model Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology (UTAUT) Dengan Metode Structural Equation Modeling (SEM)*: Bandung: Teknik Industri, Fakultas Rekayasa Industri, Universitas Telkom.
- TNP2K. (2018). *Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin*. [http://www.tnp2k.go.id/id/data-indikator/data-terpadu-program-penanganan-fakir-miskin/tentang-data-terpadu-program-penanganan-fakir-miskin-\(diakses 25 Januari 2018\)](http://www.tnp2k.go.id/id/data-indikator/data-terpadu-program-penanganan-fakir-miskin/tentang-data-terpadu-program-penanganan-fakir-miskin-(diakses%20Januari%202018)).
- Walgito, B. (2003). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi.